

## Peran Serta Pajak, Retribusi Dan Lain-Lain Pad Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Dynne Andriany<sup>1)</sup>, Muhammad Iqbal Husein<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon, <sup>2)</sup> Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Pattimura

e-mail: [andriandydnyne5@gmail.com](mailto:andriandydnyne5@gmail.com)<sup>1)</sup>

### Abstract

*This research aims to find out whether Regional Taxes, Regional Levies and other legitimate PAD have an effect on the receipt of Original Regional Income. This research is a quantitative descriptive research using secondary data. Based on the results of data analysis using SPSS 20, it is known that the coefficient of determination multiple (R<sup>2</sup>) or R Square is 0.864 or 86.4%, this shows that regional taxes, regional levies and other legitimate PAD are simultaneously able to explain the rise and fall in PAD of western Seram district, Maluku Province by 86.4%, while the remaining 13.6% was influenced by other factors outside this research. While partially only levies have a significant effect on the PAD of western Seram district with a significance value of 0.018. Meanwhile, taxes and other legal PAD partially have no effect on the PAD of West Seram Regency due to the lack of taxpayer compliance in paying taxes and also the decline in economic activity in the tourism sector in 2020 due to the COVID-19 pandemic.*

**Keywords:** Regional Tax, Regional Levy, Original Regional Income

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS 20, maka diketahui bahwa koefisien determinasi berganda (R<sup>2</sup>) atau R Square adalah sebesar 0,864 atau 86,4%, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah secara simultan mampu menjelaskan turun naiknya PAD kabupaten seram bagian barat, Provinsi Maluku sebesar 86,4%, sedangkan sisanya sebesar 13,6% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini. Sedangkan secara parsial hanya retribusi saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap PAD kabupaten seram bagian barat dengan nilai signifikansi 0.018. Sedangkan Pajak dan lain PAD yang sah secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD kabupaten seram bagian barat dikarenakan masih kurang patuhnya wajib pajak untuk membayar pajak dan juga menurunnya aktivitas ekonomi pada sector pariwisata di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic COVID 19.

**Kata Kunci :** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

### 1. PENDAHULUAN

Bervariasinya intensitas kegiatan ekonomi setiap daerah dapat dilihat dari kebutuhan anggaran belanja dalam pelaksanaan berbagai fungsi pelayanan publik di daerah tersebut. Terdapat beberapa sarana prasarana yang ada pada daerah kepulauan dimana letaknya cukup jauh dari pemerintah daerah dirasa belum maksimal sehingga mengakibatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga masih terbatas. Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah suatu daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan definisi dari pendapatan asli daerah dimana jika PAD suatu daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga akan ikut meningkat sehingga mengakibatkan

tingkat kemandirian daerah tersebut akan meningkat pula dan mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut.

Iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang merupakan definisi dari pajak daerah. Pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan utama suatu daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah. Lain-lain PAD yang sah adalah Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang

tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, lain-lain PAD ini antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun sifat lainnya sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Widjayanto (2018:773) dalam penelitiannya Peranan Pajak Dan Retribusi Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PAD Kota Surabaya, akan tetapi jika dilihat secara parsial hanya pajak daerah saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD Kota Surabaya, sedangkan retribusi daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PAD Kota Surabaya. Sedangkan hasil penelitian dari Riswati (2022:12) dalam penelitiannya dengan judul Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pad Di Kabupaten Bandung menyatakan bahwa pajak daerah, memiliki andil yang sangat besar dalam peningkatan PAD di Kabupaten Bandung. Kemudian Amin (2013:434) dengan penelitiannya Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah mengemukakan bahwa Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2006-2012 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% pertahun.

Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun serta mengembangkan daerahnya telah mengupayakan untuk meningkatkan potensi yang ada pada daerah agar dapat meningkatkan PADnya. Upaya tersebut dilakukan melalui ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang ada salah satu contohnya adalah peningkatan potensi alam untuk pariwisata dimana diharapkan dapat meningkatkan target setiap tahunnya tentu saja juga diharapkan akan diikuti oleh pencapaian realisasi dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 ayat 6 UU No. 34 Tahun 2000, pajak daerah adalah pungutan wajib yang

dilakukan terhadap orang pribadi atau badan oleh daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan dalam Peraturan menteri keuangan nomor 11/pmk.07/2010 menyatakan bahwa daerah otonom merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai aturan wilayah yang berwenang dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aturannya sendiri tentunya harus berdasarkan pendapat serta pandangan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar inilah suatu daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak. Pajak daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah; (1) Pajak Propinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak penggunaan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, (2) Pajak Kabupaten/Kota adalah; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Tentunya penetapan peraturan ini dilandaskan pada pertimbangan bahwa pajak yang dipungut secara umum dapat diambil hampir di semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan pungutan yang dilakukan dengan baik.

Pajak Daerah merupakan suatu kontribusi yang diharuskan kepada suatu daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang tentu saja bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk kepentingan daerah tersebut dan juga untuk kemakmuran rakyat. Menurut direktorat pendapatan daerah direktorat jenderal bina keuangan daerah kementerian dalam negeri Pajak Kabupaten / Kota ini terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Risnawati dalam penelitiannya dengan judul Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD Di Kabupaten Bandung diemukan bahwa pajak daerah, memiliki kontribusi yang besar bagi peningkatan PAD di Kabupaten Bandung, dan untuk adanya pelayanan yang prima, Pemerintah Daerah, melakukan jemput bola, dengan mendirikan UPT-UPT pelayanan pajak daerah, dan melakukan dengan menggunakan mobil keliling secara terjadwal disetiap UPT-UPT.

### 2.2. Retribusi Daerah

Pungutan daerah yang diambil sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan disebut sebagai retribusi daerah. Direktorat pendapatan daerah direktorat jenderal bina keuangan daerah kementerian dalam negeri menyatakan bahwa Retribusi Kabupaten / Kota meliputi Jasa Umum antara lain: Kesehatan, Persampahan, KTP dan Akta Capil, Pemakaman, Parkir di tepi jalan umum, Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Biaya CetakPeta, Penyedotan Kaku, Pengolahan Limbah Cair, Tera/Tera Ulang, Pendidikan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sedangkan Jasa Usaha terdiri dari Daerah, Pasar Grosir/Pertokoan, Tempat Pelelangan, Terminal, Tempat Khusus Parkir, Tempat Penginapan/Villa, Rumah Potong Hewan, Kepelabuhanan, Tempat Rekreasi dan Olahraga, Penyeberangan di air, Penjualan Produksi Daerah. Martini Dkk 2019 dalam penelitiannya dengan judul Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, diketahui bahwa setiap tahun terjadi penurunan kontribusi serta retribusi daerah di kota Palembang, sedangkan tingkat efektifitasnya mengalami perubahan naik-turun. Kontribusi retribusi daerah dirasa belum ada perubahan setiap tahunnya, hal ini terjadi akibat adanya perubahan objek retribusi serta kurangnya sosialisasi atas peraturan daerah, dan adanya jenis retribusi daerah yang baru diterapkan tanpa adanya sosialisasi. Kontribusi retribusi jasa perizinan ter tentu terbesar dibandingkan jenis retribusi lainnya.

### 2.3. Lain-Lain PAD Yang Sah

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai UU No. 23 Tahun 2014 dibuat untuk penganggaran penerimaan daerah yang tentu saja tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan lain-lain yang sah adalah terdiri dari:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
  2. Penerimaan jasa giro
  3. Pendapatan dari pengembalian
  4. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
  5. Pendapatan dari asuransi kesehatan pegawai
- hasil pendapatan asli daerah yang sah merupakan hasil pendapatan yang didapat oleh daerah tentunya berdasarkan penerimaan yang diperoleh melalui hasil penjualan harta atau aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan dari asuransi kesehatan pegawai. hasil penelitian Mulyani dan Ramdini 2021 Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019 ditemukan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan serta positif terhadap PAD, Lain-lain PAD yang Sah tidak memiliki pengaruh yang signifikan serta positif terhadap PAD, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PAD, dan Pajak Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan Terhadap PAD Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019.

### 2.4. Pendapatan Asli Daerah

Mardiasmo (2002:146) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Darise (2006:145) menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapati oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri harus diadakan peningkatan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun terus meningkat agar dapat mencapai kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Halim (2016) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang didapati oleh suatu daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri tentunya dipungut berdasarkan peraturan daerah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian Apriandi dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara parsial pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sedangkan retribusi daerah memiliki pengaruh yang negative terhadap desentralisasi fiskal. Dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang paling dominan mempengaruhi kinerja keuangan.

## 3. METODOLOGI

### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Arikunto, 2006 mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang memiliki tujuan untuk membuat gambar atau penjelasan tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka serta dimulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh pada saat melakukan observasi pada objek penelitian kemudian diuji dengan menggunakan analisis statistik inferensial yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS 20 untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Provinsi Maluku

**3.2. Objek/Partisipan Penelitian**

Objek di dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan partisipan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

**3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui wawancara untuk mendapatkan data empiris yaitu laporan keuangan yang dibutuhkan untuk kemudian dilakukan analisis statistic inferensial.

**3.4. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis statistic inferensial dengan menggunakan alat analisis SPSS 20. mengukur pengaruh antara variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel bebas terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel terikat.

**3.4.1. Analisis Model Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda diperlukan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah sebagai variabel independent terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependent.

Ghozali 2005 mengemukakan bahwa analisis regresi memiliki tujuan untuk menghitung dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Variabel independen pendapatan asli daerah

a : Konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> : Koefisien regresi variabel bebas 1,2 dan 3

X<sub>1</sub> : Variabel dependen pajak daerah

X<sub>2</sub> : Variabel dependen retribusi daerah

X<sub>3</sub> : Variabel dependen Lain-lain PAD yang sah

e : Standard error

**3.4.2. Uji Simultan (Uji F)**

Uji F adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat signifikansi atau pengaruh secara simultan antara variabel bebas pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah.

**3.4.3. Uji Parsial (Uji t)**

Uji t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara parsial dari variabel bebas pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku**

Berdasarkan hasil pengumpulan data dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah, retribusi dan Lain-lain PAD yang sah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

**Tabel 1.**

**Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Tahun 2020 sampai 2022 (dalam Milyar Rupiah)**

Keterangan	2020	2021	2022
PAD	28.342	9.754	39.369
Pajak Daerah	5.667	7.651	8.208
Retribusi Daerah	1.216	1.903	3.533
Lain-lain PAD Sah	18.524	19.501	25.907

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, 2023

Dari data tabel di atas yang di dapat dari badan pendapatan daerah kabupaten seram bagian barat diketahui bahwa pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi dan lain-lain PAD yang sah daerah kabupaten seram bagian barat, Provinsi Maluku selama kurun waktu antara tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami fluktuatif dan nilai yang paling tinggi ada pada tahun 2022 yaitu PAD sebesar 39.636, pajak daerah 8.208, retribusi daerah sebesar 3.533 sedangkan lain-lain PAD yang sah sebesar 25.907. terjadinya fluktuatif ini dikarenakan beberapa factor yaitu jumlah wisatawan yang berkunjung dan juga kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah.

**4.2. kontribusi pajak daerah terhadap PAD**

**Tabel 2.**

**Kontribusi Pajak Daerah pada pendapatan asli daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Tahun 2020 sampai 2022 (dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Kontribusi
2020	28.342	5.667	19.99 %

2021	9,754	7,651	78.43%
2022	39.369	8.208	20.7%
Rata-Rata			39,7%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah kabupaten seram bagian barat, Provinsi Maluku Tahun 2020 sampai 2022 didapati bahwa kontribusi dari tahun 2020 sampai dengan 2021 juga mengalami fluktuasi dan kontribusi yang paling besar didapat pada tahun 2021 yaitu sebesar 78.43% dengan rata-ratanya sebesar 39.7%.

**4.3. Hasil statistic Inferensial**

**1. Analisis Model Regresi Linier Berganda**

**Tabel 3.**

**Koefisien Regresi Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	1.220	.908		1.343	.250
PAJAK	-.092	.104	-.194	-.891	.423
RETRIB USI	.820	.213	.820	3.848	.018
LAIN-LAIN PAD	-.109	.090	-.229	1.203	.295

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data diolah 2024

Model regresi linier berganda yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:  $Y = 1.220 + -0.092 X_1 + 0,820 X_2 + -0.109 + 0.569$

**4. Pengujian Pengaruh Simultan (Uji F)**

**Tabel 4.**

**Uji Simultan (Uji F)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	8.207	3	2.736	8.463	.033 <sup>b</sup>
Residual	1.293	4	.323		
Total	9.500	7			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), LAIN-LAIN PAD, RETRIBUSI, PAJAK

Sumber: Data diolah 2024

Uji F dilakukan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-

sama terhadap variabel terikatnya. Dari hasil uji SPSS diatas diketahui bahwa nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,033 < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD kabupaten seram bagian barat, Provinsi Maluku.

**3. Koefisien Determinasi Berganda**

**Tabel 5.**

**Koefisien Determinasi Berganda (R<sup>2</sup>) Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.929 <sup>a</sup>	.864	.762	.569

Predictors: (Constant), LAIN-LAIN PAD, RETRIBUSI, PAJAK

Sumber: Data diolah 2024

R square disebut juga sebagai koefisien determinasi yang menjelaskan seberapa jauh data dependen dapat dijelaskan oleh data independen. R square bernilai antar 0 – 1 dengan ketentuan semakin mendekati angka satu berarti semakin baik. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa koefisien determinasi berganda (R<sup>2</sup>) atau R Square adalah sebesar 0,864 atau 86.4%, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah secara simultan mampu menjelaskan turun naiknya PAD kabupaten seram bagian barat, Provinsi Maluku sebesar 86.4%, sedangkan sisanya sebesar 13.6% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini.

**4. Uji Parsial (Uji t)**

Ghozali (2016:98) mengemukakan bahwa uji statistik t (parsial) dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa nilai signifikansi > 0,05 yaitu 0,423 > 0,025, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten seram bagian barat, Provinsi Maluku hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran taat pajak.

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,018 < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten seram bagian barat, Provinsi Maluku. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa nilai signifikansi > 0,05 yaitu 0,295 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa lain-lain PAD secara parsial tidak berpengaruh

signifikan terhadap PAD kabupaten seram bagian barat, Provinsi Maluku hal ini dikarenakan menurunnya aktivitas ekonomi pada sector pariwisata.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah secara bersama-sama mampu menjelaskan fluktuasi PAD kabupaten seram bagian barat, Provinsi Maluku dengan presentase 86,4% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain diluar variable peneliti, jika dilakukan pengukuran secara terpisah yaitu dengan melihat dampak relative dari satu variable tanpa memperhitungkan variable lainnya hanya variabel retribusi saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap PAD kabupaten seram bagian barat dengan nilai signifikansi 0.018. sedangkan Pajak dan lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap PAD kabupaten seram bagian barat dikarenakan masih kurang patuhnya wajib pajak untuk membayar pajak dan juga menurunnya aktivitas ekonomi yang terjadi di sector pariwisata pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic COVID 19 yang mengakibatkan menurunnya kunjungan wisatawan pada objek wisata yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Sesuai dengan penelitian Mulyani dan Ramdini (2021) Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. Hasilnya menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Lain-lain PAD yang Sah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PAD, dan Pajak Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan Terhadap PAD Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019..

### 5.2. Saran

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun pengamatan agar hasil penelitian yang didapat lebih akurat lagi mengingat bahwa pandemic covid 19 telah berakhir. Selain itu untuk badan pendapatan daerah kabupaten seram bagian barat agar lebih meningkatkan pengembangan strategi komunikasi dan edukasi kepada wajib pajak yang diharapkan wajib pajak lebih sadar akan taat pajak dan juga bisa meningkatkan serta mengembangkan potensi wilayah untuk sector pariwisata agar pajak dan retribusi pariwisata dapat

dioptimalkan dengan lebih baik lagi sehingga pendapatan daerah juga akan meningkat dan kualitas pelayanan publik juga akan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2016. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Amin 2013. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 2 No 1: IQTISHADUNA.
- Aprilianda.2016.Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur.Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB.Vol 4 No2.
- Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Darise, Nurlan. 2006, Pengelolaan Keuangan Daerah, PT. Indeks Kelompok Gramedia Anggota IKAPI, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Mulyani,Ramdini.2021. Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. Jurnal akuntansi dan sistem informasi vol.2.No.2.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta
- Martini dkk.2019. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan Vol 2 No.1.
- Risnawati.2022.Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pad Di Kabupaten Bandung. JEKP ( Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik ) Vol. 9, No. 1,2 – 22.
- Widajanto, M. 2018. Peranan Pajak Dan Retribusi Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Jurnal penelitian ekonomi dan akuntansi. 3(2), 773.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/144781/pmk-no-11pmk072010>
- <https://peraturan.bpk.go.id>
- <https://keuda.kemendagri.go.id>
- <https://jdih.bappenas.go.id>